



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NO. 3, JAKARTA PUSAT 10110
TELEPON: 021-3459444 (HUNTING), FAKSIMILE: 021-3843768
SITUS: <http://www.kemenkopmk.go.id>

**SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN RENCANA AKSI
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
TAHUN 2024**

Yth. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan,
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
di Jakarta

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Aris Darmansyah Edisaputra

NIP : 19670816 199403 1 004

Jabatan : Staf Ahli Bidang Transformasi Birokrasi, selaku Pengarah RB Kemenko PMK

Menyampaikan bahwa sehubungan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi pada tahun 2024, dengan ini kami menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

1. Rencana aksi pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2024 yang disampaikan pada Portal RB Nasional adalah benar dan sah;
2. Seluruh rencana aksi yang disampaikan akan dilaksanakan dengan baik dalam rangka mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi;
3. Apabila di kemudian hari ditemukan terdapat kondisi yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, maka kami bersedia untuk melakukan klarifikasi atas rencana aksi yang sudah disampaikan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 11 Juni 2024

Staf Ahli Bidang Transformasi Birokrasi selaku
Pengarah Reformasi Birokrasi Kemenko PMK,

Aris Darmansyah Edisaputra
NIP. 19670816 199403 1 004

Tembusan Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, (sebagai laporan);
2. Sekretaris Kementerian;
3. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial;
4. Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan.

**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN
MANUSIA DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**

BIRO PERENCANAAN DAN KERJA SAMA

NOTA DINAS
NOMOR: 1282/ROREN/PR.08.00/05/2024

Kepada Yth. : 1. Asisten Deputi Penanganan Kemiskinan selaku Ketua Tim RB Tematik
Bidang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
2. Asisten Deputi Ketahanan Gizi dan Promosi Kesehatan selaku Ketua
Tim RB Bidang Percepatan Penurunan Stunting
3. Para Kepala Biro
4. Inspektur

Dari : Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama selaku Ketua Tim RB General

Hal : Permohonan Peninjauan dan Persetujuan atas Perubahan Rencana Aksi

Tanggal : 2 Mei 2024

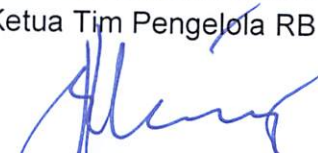
Lampiran : 1 (satu) berkas

Menindaklanjuti hasil Reviu Lembar Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Kemenko PMK Tahun 2023 yang dilaksanakan tanggal 18 Maret 2024 oleh Kementerian PANRB, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagaimana berikut:

1. Kemenko PMK dinilai perlu melakukan perbaikan Rencana Aksi RB Tahun 2024 dengan menyesuaikan target agar mencapai kriteria minimal "baik", menjawab atau memfasilitasi rekomendasi dari instansi evaluator masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU), memastikan agar *output* Rencana Aksi dapat menjawab sasaran IKU, dan menganalisis kembali permasalahan aktual untuk rencana aksi RB Tematik;
2. Menimbang catatan pada poin 1, Tim Pengelola RB General dan Tematik Kemenko PMK telah menyusun draf Rencana Aksi masing-masing melalui *Focus Group Discussion* (FGD) yang dilaksanakan di Hotel Santika Premiere Hayam Wuruk, tanggal 29 April 2024.
3. Mengingat bahwa Rencana Aksi perlu disahkan oleh Eselon II terkait, kami mohon kesediaan Saudara untuk meninjau kembali draf tersebut dan membubuhkan paraf di sisi kanan bawah sebagai persetujuan.
4. Usulan perubahan atas Draft Rencana Aksi dapat disampaikan melalui Sdri. Adinda Sekar (0813-1000-1498) yang kami tugaskan sebagai narahubung, **paling lambat Rabu, 22 Mei 2024.**

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama
selaku Ketua Tim Pengelola RB General


Linda Restaningrum

Draf Perubahan Rencana Aksi RB General: Biro Perencanaan dan Kerja Sama

NO	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KEGIATAN UTAMA	TARGET TAHUN 2023	TARGET TAHUN 2024	RENCANA AKSI (UPAYA UTK MEWUJUDKAN)	OUTPUT		TARGET PENYELESAIAN					UNIT/SATUAN KERJA PELAKSANA		
						JUMLAH	SATUAN	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	KOORDINATOR	PELAKSANA	
SS.1 Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif dan Akuntabel															
4	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Indeks Perencanaan Pembangunan (Kementerian PPN/Bappenas)	Komposit 5	94 (Penilaian Bappenas)	1. FGD untuk Penyusunan Rencana Kerja Kemenko PMK dengan RPJMN, RKP, Renstra Kemenko PMK	1	Dokumentasi	1					1	Biro Perencanaan dan Kerja Sama	Biro Perencanaan dan Kerja Sama dan Seluruh Unit
					2. FGD Penajaman Usulan Renja K/L, Sesuai dengan RPJMN, RKP dan Renstra Kemenko PMK, serta sebagai wadah untuk melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka mengantisipasi dinamika perubahan kebijakan dan regulasi	1	Dokumen	1					1	Biro Perencanaan dan Kerja Sama	Biro Perencanaan dan Kerja Sama dan Seluruh Unit
					3. Penelahaan Renja K/L dengan seluruh unit kerja	1	Dokumentasi	1					1	Biro Perencanaan dan Kerja Sama	Biro Perencanaan dan Kerja Sama dan Seluruh Unit
					4. Penelahaan dan Penelitian RKA-KL Pagu Anggaran, dan Alokasi Anggaran	1	Dokumentasi		1				1	Biro Perencanaan dan Kerja Sama	Biro Perencanaan dan Kerja Sama dan Seluruh Unit
					5. Reviu Perjanjian Kinerja	1	Dokumentasi		1				1	Biro Perencanaan dan Kerja Sama	Biro Perencanaan dan Kerja Sama dan Seluruh Unit
		Nilai SAKIP (Kemen PAN RB)	83,01 (A)	83,10 (A) Disesuaikan Perubahan Renstra Setmenko	1. Optimalisasi aplikasi SIPP dan Laptri sebagai alat pemantauan	4	Laporan	1	1	1	1	4	Biro Perencanaan dan Kerja Sama	Biro Perencanaan dan Kerja Sama dan Seluruh Unit	
					2. Melakukan reviu LHE SAKIP oleh Kementerian PANRB	1	Dokumentasi		1				1	Biro Perencanaan dan Kerja Sama	Biro Perencanaan dan Kerja Sama dan Biro Umum dan SDM
					3. Melakukan reviu Permenko 4/2021 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja	1	Dokumen		1				1	Biro Perencanaan dan Kerja Sama	Biro Perencanaan dan Kerja dan Inspektorat
					4. Sosialisasi pedoman pelaporan dan akuntabilitas	1	Dokumentasi Kegiatan			1			1	Biro Perencanaan dan Kerja Sama	Biro Perencanaan dan Kerja dan Inspektorat

NO	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KEGIATAN UTAMA	TARGET TAHUN 2023	TARGET TAHUN 2024	RENCANA AKSI (UPAYA UTK MEWUJUDKAN)	OUTPUT		TARGET PENYELESAIAN					UNIT/SATUAN KERJA PELAKSANA	
						JUMLAH	SATUAN	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	KOORDINATOR	PELAKSANA
					5. Penilaian pelaporan triwulan oleh Tim Penilai KUK	4	Dokumen Laporan dan Nilai Laptri	1	1	1	1	4	Biro Perencanaan dan Kerja Sama	Biro Perencanaan dan Kerja dan Tim KUK
					6. Penyusunan <i>feedback</i> dalam rangka perbaikan kualitas laporan kinerja	2	Dokumen Laporan		1		1	2	Biro Perencanaan dan Kerja Sama	Biro Perencanaan dan Kerja Sama dan Seluruh Unit

Draf Perubahan Rencana Aksi RB General: Biro Umum dan Sumber Daya Manusia

NO	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KEGIATAN UTAMA	TARGET TAHUN 2023	TARGET TAHUN 2024	RENCANA AKSI (UPAYA UTK MEWUJUDKAN)	OUTPUT		TARGET PENYELESAIAN					UNIT/SATUAN KERJA PELAKSANA		
						JUMLAH	SATUAN	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	KOORDINATOR	PELAKSANA	
SS.1 Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif dan Akuntabel															
2	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat Implementasi Kebijakan Sistem Kerja Baru dan Fleksibilitas bekerja pegawai (Kemen PAN RB)	75%	100%	1. Penyusunan kertas kerja penilaian mandiri evaluasi sistem kerja	1	Dokumen				1		1	Biro Umum & SDM	Kepala Biro Umum& SDM/Kepala Biro HUPOK, Tim Kepegawaian dan Organisasi
					2. Mereviu terkait pelaksanaan evaluasi mandiri	1	Dokumentasi				1	1	Biro Umum & SDM	Kepala Biro Umum& SDM/Kepala Biro HUPOK, Tim Kepegawaian dan Organisasi	
					3. Penghimpunan dokumen sistem kerja pada unit kerja	1	Dokumen				1	1	Biro Umum & SDM	Kepala Biro Umum& SDM/Kepala Biro HUPOK, Tim Kepegawaian dan Organisasi	
12	Pelaksanaan Arsip Digital	Tingkat Digitalisasi Arsip (ANRI)	69,07 (B) (baseline 2022, sumber: Hasil Pengawasan Kearsipan ANRI 2022)	74	1. Menetapkan Kebijakan penerapan SRIKANDI yang masih dalam bentuk rancangan dan merumuskan kebijakan yang belum di susun	1	Dokumen kebijakan	1					1	Biro Umum dan SDM	Biro Umum dan SDM, Tim Arsiparis
					2. Menerapkan aplikasi SRIKANDI secara menyeluruh	1	Dokumentasi				1		1	Biro Umum dan SDM	Biro Umum dan SDM
					3. Menentukan target dan melaksanakan alih media arsip sesuai dengan ketentuan alih media yang berlaku	1	Dokumentasi				1	1	Biro Umum dan SDM	Biro Umum dan SDM	
					4. Melaksanakan seluruh tanggung jawab sebagai simpul jaringan	1	Dokumentasi				1	1	Biro Umum dan SDM	Biro Umum dan SDM	
14	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan (LKPBJ)	54,2 (Lampiran Hasil Final ITKP 2022)	82,29	1. Penginputan dan Penyusunan Rencana Umum Pengadaan	1	Dokumen	1					1	Biro Umum dan SDM	Biro Umum dan SDM
					2. Penginputan Pencatatan SPSE	1	Dokumen					1	1	Biro Umum dan SDM	Biro Umum dan SDM
					3. Penyusunan laporan perencanaan kinerja dan laporan pelaksanaan tugas UKPBJ	1	Dokumen					1	1	Biro Umum dan SDM	Biro Umum dan SDM

NO	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KEGIATAN UTAMA	TARGET TAHUN 2023	TARGET TAHUN 2024	RENCANA AKSI (UPAYA UTK MEWUJUDKAN)	OUTPUT		TARGET PENYELESAIAN					UNIT/SATUAN KERJA PELAKSANA	
						JUMLAH	SATUAN	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	KOORDINATOR	PELAKSANA
					4. Penguatan Kelembagaan UKPBJ	1	Dokumen				1	1	Biro Umum dan SDM	Biro Umum dan SDM
15	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Opini BPK	WTP	WTP	1. Penyusunan Laporan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)	2	Laporan	1		1		2	Biro Umum dan SDM	Biro Umum (bagian keuangan)
					2. Penyusunan Laporan Keuangan	4	Laporan	1	1	1	1	4	Biro Umum dan SDM	Biro Umum dan SDM
					3. Melakukan Pendidikan dan Pelatihan guna Peningkatan Kapasitas dan Kualitas bagi SDM Pengelola Keuangan	1	Dokumen			1		1	Biro Umum dan SDM	Biro Umum dan SDM
					4. Penyusunan peraturan atau ketentuan yang terkait dengan pengelolaan keuangan	1	Dokumen	1				1	Biro Umum dan SDM	Biro Umum dan SDM
		Indikator Kinerja pelaksanaan Anggaran (IKPA)	95,5	96	1. Melakukan Rapat Evaluasi Pelaksanaan Anggaran	4	Dokumen	1	1	1	1	4	Biro Umum dan SDM	Biro Umum dan SDM, Tim Keuangan
					2. Melakukan Pertemuan Peningkatan Kapasitas Tim Pengelolaan Keuangan	1	Dokumen		1			1	Biro Umum dan SDM	Biro Umum dan SDM, Tim Keuangan
					3. Penyusunan SK Tim Pengelolaan Keuangan	1	Dokumen	1				1	Biro Umum dan SDM	Biro Umum dan SDM, Tim Keuangan
		Indeks Pengelolaan Aset (adjusted)	100% (sumber: LAKIP Setmenko)	3.65	1. Evaluasi Penggunaan BMN Sesuai ketentuan	1	Dokumen			1		1	Biro Umum dan SDM	Biro Umum dan SDM, Bagian Rumah Tangga
					2. Menindaklanjuti BMN Rusak Berat	1	Dokumen				1	1	Biro Umum dan SDM	Biro Umum dan SDM, Bagian Rumah Tangga
SS.2: Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional														
19	Penguatan Sistem Merit (adjusted)	Indeks Sistem Merit (KASN dan BKN) (adjusted)	0,68 (baseline 2022,sumber: Keputusan KASN) hasil penilaian sementara 258,5 (baik)	260	1. Pelaksanaan Uji Kompetensi Pegawai Kemenko PMK	1	Laporan Rekapitulasi				1	1	Biro Umum dan SDM	Kepala Biro Umum dan SDM, dan Tim Kepegawaian Kemenko PMK
					2. Pengangkatan/pelantikan jabatan fungsional	1	Laporan Rekapitulasi				1	1	Biro Umum dan SDM	Kepala Biro Umum dan SDM, dan Tim Kepegawaian Kemenko PMK
					3. Penghimpunan SKP dari pegawai	1	Laporan Rekapitulasi				1	1	Biro Umum dan SDM	Instansi Pembina JFT, Kepala Biro Umum dan SDM, dan Tim Kepegawaian Kemenko PMK

NO	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KEGIATAN UTAMA	TARGET TAHUN 2023	TARGET TAHUN 2024	RENCANA AKSI (UPAYA UTK MEWUJUDKAN)	OUTPUT		TARGET PENYELESAIAN					UNIT/SATUAN KERJA PELAKSANA	
						JUMLAH	SATUAN	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	KOORDINATOR	PELAKSANA
					4. Penyusunan konsep/draf profil pegawai Kemenko PMK berdasarkan kompetensi	1	Dokumen			1		1	Biro Umum dan SDM	BKN, Kepala Biro Umum dan SDM, dan Tim Kepegawaian Kemenko PMK
					5. Penyusunan SE Tata Cara Penetapan Predikat Kinerja di Lingkungan Kemenko PMK	1	Dokumen	1				1	Biro Umum dan SDM	Kepala Biro Umum dan SDM, dan Tim Kepegawaian Kemenko PMK
					6. Sosialisasi kepada Unit Kerja terkait SE Tata Cara Penetapan Predikat Kinerja di Lingkungan Kemenko PMK	1	Dokumentasi	1				1	Biro Umum dan SDM	Kepala Biro Umum dan SDM, dan Tim Kepegawaian Kemenko PMK
					7. Sosialisasi dalam bentuk infografis yang ditayangkan melalui media elektronik (TV Kemenko PMK)	1	Dokumen		1			1	Biro Umum dan SDM	BKN, Kepala Biro Umum dan SDM, dan Tim Kepegawaian Kemenko PMK
20	Pelaksanaan Core Values ASN	Indeks Berakhlak*	55,3% (baseline 2022)	60%	1. Review indikator penilaian pegawai teladan berdasarkan indeks BerAKHLAK	1	Dokumen			1		1	Biro Umum dan SDM	Kepala Biro Umum dan SDM, dan Tim Kepegawaian Kemenko PMK
					2. Pelaksanaan Survey Berakhlak	1	Dokumen				1	1	Biro Umum dan SDM	Kepala Biro Umum dan SDM, dan Tim Kepegawaian Kemenko PMK

Draf Perubahan Rencana Aksi RB General: Biro Hukum, Persidangan, Organisasi, dan Komunikasi

NO	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KEGIATAN UTAMA	TARGET TAHUN 2023	TARGET TAHUN 2024	RENCANA AKSI (UPAYA UTK MEWUJUDKAN)	OUTPUT		TARGET PENYELESAIAN					UNIT/SATUAN KERJA PELAKSANA	
						JUMLAH	SATUAN	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	KOORDINATOR	PELAKSANA
SS.1 Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif dan Akuntabel														
1	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/transformasi organisasi berbasis kinerja dan <i>agile</i>	Tingkat Implementasi Penyederhanaan birokrasi (Kemen PANRB)	Komposit 5	80% atau baik (diubah dari target 2024)	Melaksanakan Penilaian Penyederhanaan Struktur Organisasi (PSO)	1	Dokumen dengan dilampirkan Permenko			1		1	Biro Hukum, Persidangan, Organisasi, dan Komunikasi	Kelompok Ortala
8	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tingkat tindak lanjut Pengaduan masyarakat (LAPOR) (Kemen PANRB)	100% Ditindaklanjuti	Nilai 4 (baik)	1. Pengaduan ditindaklanjuti secara substantif	1	Laporan				1	1	Biro Hukum Persidangan Organisasi & Komunikasi	Kelompok Humas
					2. Memiliki Rencana Aksi Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	1	Dokumen laporan		1			1	Biro Hukum Persidangan Organisasi & Komunikasi	Kelompok Humas
					3. Kecepatan Tindak Lanjut < 3 hari	1	Dokumen laporan				1	1	Biro Hukum Persidangan Organisasi & Komunikasi	Kelompok Humas
					4.Rata-rata rating penilaian masyarakat > 4	1	Dokumen laporan				1	1	Biro Hukum Persidangan Organisasi & Komunikasi	Kelompok Humas
10	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks Kualitas Kebijakan Publik (LAN)	36,63 (baseline 2021, sumber: LAN) 77,71 (capaian 2023, sumber: LAN)	77,71 (baik)	1. Evaluasi Permenko PMK tahun 2023 dan 2024 yang berkaitan masyarakat luar dengan memperhatikan pemenuhan dan pengumpulan kelengkapan data dukung penyusunan dan evaluasinya	1	Laporan		1			1	Biro Hukum Persidangan Organisasi & Komunikasi	Kelompok Hukum
					2. Pembuatan sistem pemantauan perkembangan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan	1	Laporan		1				1	Biro Hukum Persidangan Organisasi & Komunikasi
11	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan	Indeks Reformasi Hukum (KemenKUMHAM)		71	1. Penguatan koordinasi KemenKUMHAM dalam penyusunan Perundang-undangan bidang PMK	1	Dokumen	100%	100%	100%		100%	Biro Hukum Persidangan Organisasi & Komunikasi	Kelompok Hukum

NO	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KEGIATAN UTAMA	TARGET TAHUN 2023	TARGET TAHUN 2024	RENCANA AKSI (UPAYA UTK MEWUJUDKAN)	OUTPUT		TARGET PENYELESAIAN					UNIT/SATUAN KERJA PELAKSANA	
						JUMLAH	SATUAN	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	KOORDINATOR	PELAKSANA
21	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Capaian 2023 Sem 1: 88.61 Sem 2: 85.57 (Baik)	88 (baik)	2. Melaksanakan reregulasi, deregulasi atau penyederhanaan regulasi bidang PMK	2	Dokumen		1	1		2	Biro Hukum Persidangan Organisasi & Komunikasi	Kelompok Hukum
					3. Meningkatkan kompetensi SDM perancang peraturan perundang-undangan dan analisis hukum	1	Dokumen			1		1	Biro Hukum Persidangan Organisasi & Komunikasi	Kelompok Hukum
		Indeks Pelayanan Publik (Kementerian PANRB)	Capaian 2023 3.81 (Baik)	3,81 – 3.85 (Baik)	1. Pengukuran dan pelaporan SKM secara periodik	2	Dokumen laporan		1		1	2	Biro Hukum Persidangan Organisasi & Komunikasi	Kelompok Humas
					2. Sosialisasi hasil SKM kepada masyarakat	2	Dokumen laporan		1		1	2	Biro Hukum Persidangan Organisasi & Komunikasi	Kelompok Humas
					1. Reviu Standar Pelayanan Kemenko PMK	1	Dokumen laporan		1			1	Biro Hukum Persidangan Organisasi & Komunikasi	Kelompok Humas dan Hukum
					2. Peningkatan Kompetensi SDM Pengelola Layanan Publik	1	Dokumen laporan kegiatan			1		1	Biro Hukum Persidangan Organisasi & Komunikasi	Kelompok Humas
					3. Penyediaan Sarana dan Prasarana sesuai standar dan inklusif	1	Dokumen laporan			1		1	Biro Umum dan SDM	Biro Hupok dan Biro Umum dan SDM
					4. Pembaharuan data PMK dalam SIPPN	2	Dokumen laporan		1		1	2	Biro Hukum Persidangan Organisasi & Komunikasi	Kelompok Humas
					5. Sosialisasi inovasi pelayanan publik	1	Dokumen laporan				1	1	Biro Hukum Persidangan Organisasi & Komunikasi	Kelompok Humas

Draf Perubahan Rencana Aksi RB General: Biro Sistem Informasi dan Pengelolaan Data

NO	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KEGIATAN UTAMA	TARGET TAHUN 2023	TARGET TAHUN 2024	RENCANA AKSI (UPAYA UTK MEWUJUDKAN)	OUTPUT		TARGET PENYELESAIAN					UNIT/SATUAN KERJA PELAKSANA	
						JUMLAH	SATUAN	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	KOORDINATOR	PELAKSANA
SS.1 Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif dan Akuntabel														
3	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Indeks SPBE (Kemen PAN RB)	3,5	3,52	1. Melaksanakan evaluasi kebijakan Penyelenggaraan SPBE	1	Dokumen	1				1	Biro Sistem Informasi dan Pengelolaan Data	Kepala Biro
					2. Membentuk Tim Koordinasi SPBE	1	Dokumen Surat Keputusan	1				1	Biro Sistem Informasi dan Pengelolaan Data	Kepala Biro
					3. Melaksanakan Reviu Arsitektur SPBE	1	Dokumen		1			1	Biro Sistem Informasi dan Pengelolaan Data	Kepala Biro
					4. Melaksanakan Reviu Peta Rencana Strategis SPBE	1	Dokumen		1			1	Biro Sistem Informasi dan Pengelolaan Data	Kepala Biro
					5. Menyusun standar pengembangan aplikasi SPBE	1	Dokumen Laporan		1			1	Biro Sistem Informasi dan Pengelolaan Data	Kepala Biro
					6. Melakukan Audit Internal TIK	1	Dokumen		1			1	Biro Sistem Informasi dan Pengelolaan Data	Kepala Biro
					7. Melakukan Kegiatan Penilaian Mandiri SPBE	1	Dokumen		1			1	Biro Sistem Informasi dan Pengelolaan Data	Kepala Biro
					8. Melakukan koordinasi dengan KemenPANRB terkait verifikasi hasil penilaian mandiri	1	Dokumentasi			1		1	Biro Sistem Informasi dan Pengelolaan Data	Kepala Biro
		Tingkat Implementasi Inisiatif Strategi Arsitektur SPBE	NA	2	1. Melakukan identifikasi domain arsitektur as-is bersama unit kerja	1	Dokumentasi		1			1	Biro Sistem Informasi dan Pengelolaan Data	Kepala Biro
					2. Menyusun arsitektur as-is pada SIA SPBE	1	Dokumen		1			1	Biro Sistem Informasi dan Pengelolaan Data	Kepala Biro

NO	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KEGIATAN UTAMA	TARGET TAHUN 2023	TARGET TAHUN 2024	RENCANA AKSI (UPAYA UTK MEWUJUDKAN)	OUTPUT		TARGET PENYELESAIAN					UNIT/SATUAN KERJA PELAKSANA	
						JUMLAH	SATUAN	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	KOORDINATOR	PELAKSANA
13	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral (BPS)	2	2,6	3. Menyusun arsitektur to-be pada SIA SPBE	1	Dokumen		1			1	Biro Sistem Informasi dan Pengelolaan Data	Kepala Biro
					4. Menyusun peta rencana SPBE	1	Dokumen			1		1	Biro Sistem Informasi dan Pengelolaan Data	Kepala Biro
					5. Melaksanakan reviu dan evaluasi Arsitektur SPBE (Analisis Gap, Rencana dan Anggaran, dan evaluasi lainnya)	1	Dokumentasi				1	1	Biro Sistem Informasi dan Pengelolaan Data	Kepala Biro
					1. Menentukan 2 (dua) kegiatan statistik yang akan dinilai;	1	Dokumentasi	1				1	Biro Sistem Informasi dan Pengelolaan Data	Kepala Biro
					2. Penyusunan pedoman penyelenggaraan statistik sektoral	1	Dokumen	1				1	Biro Sistem Informasi dan Pengelolaan Data	Kepala Biro
					3. Penyampaian surat edaran pedoman penyelenggaraan statistik sektoral	1	Dokumen		1			1	Biro Sistem Informasi dan Pengelolaan Data	Kepala Biro
					4. Mendaftarkan admin ke BPS	1	Dokumentasi		1			1	Biro Sistem Informasi dan Pengelolaan Data	Kepala Biro
					5. Membentuk Tim Penilai Internal (TPI) EPSS Kemenko PMK	1	Laporan		1			1	Biro Sistem Informasi dan Pengelolaan Data	Kepala Biro
					6. TPI melakukan Penilaian Mandiri	1	Dokumen		1			1	Biro Sistem Informasi dan Pengelolaan Data	Kepala Biro
					7. Koordinasi dengan Tim Penilai Badan terkait verifikasi penilaian mandiri	1	Dokumentasi			1		1	Biro Sistem Informasi dan Pengelolaan Data	Kepala Biro
					8. Sosialisasi statistik sektoral di lingkungan Kemenko PMK	2	Dokumentasi	1			1	2	Biro Sistem Informasi dan Pengelolaan Data	Kepala Biro
					9. Penyusunan draf Kepmenko PMK tentang Satu Data di lingkungan Kemenko PMK	1	Dokumen				1	1	Biro Sistem Informasi dan Pengelolaan Data	Kepala Biro

Lampiran Nota Dinas

Nomor : 1282/ND/ROREN/PR.08.00/5/2024

Tanggal : 2 Mei 2024

Draf Perubahan Rencana Aksi RB General: Inspektorat

NO	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KEGIATAN UTAMA	TARGET TAHUN 2023	TARGET TAHUN 2024	RENCANA AKSI (UPAYA UTK MEWUJUDKAN)	OUTPUT		TARGET PENYELESAIAN					UNIT/SATUAN KERJA PELAKSANA	
						JUMLAH	SATUAN	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	KOORDINATOR	PELAKSANA
SS.1 Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif dan Akuntabel														
6	Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI (Kemen PAN RB)	1 unit kerja WBK	2 unit kerja WBK	1. mengakomodir layanan pendampingan implementasi ZI satker dengan keterlibatan aktif pimpinan unit kerja	2	unit kerja/satuan kerja		35%	50%	100%	100%	Inspektorat	Inspektur
					2. Penilaian Mandiri Satker	1	Kegiatan		25%	100%		100%	Inspektorat	Inspektur
					3. Melakukan survei eksternal untuk menilai persepsi publik terhadap upaya-upaya anti korupsi di satker.	1	Kegiatan		25%	100%		100%	Inspektorat	Inspektur
					4. TPI melakukan reuiv atas hasil Penilaian Mandiri dan pelaksanaan survei mandiri eksternal satker serta memastikan implementasi monev yang efektif.	1	Laporan			1	1	Inspektorat	Inspektur	
7	Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP (BPKP)	4	3,8	1. Mengadakan pelatihan dan bimbingan teknis (bimtek) dalam bentuk workshop untuk semua asesor yang terlibat dalam SPIP	1	Kegiatan		25%	100%		100%	Inspektorat	Inspektur
					2. melakukan Analisis dan identifikasi risiko masing-masing unit kerja setiap tahunnya	1	Dokumen		100%			100%	Inspektorat	Inspektur
					3. Melakukan penilaian mandiri secara tahunan di semua unit kerja dan menyelesaikannya sesuai dengan peraturan yang berlaku	1	Dokumen Laporan		50%	100%		100%	Inspektorat	Inspektur
					4. Melakukan penjaminan kualitas segera setelah penilaian mandiri, dan menyelesaikannya sesuai dengan peraturan yang berlaku	1	Dokumen Laporan			100%		100%	Inspektorat	Inspektur
9	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi	3,002 (baseline 2021)	3,19	1. Mengintensifkan internalisasi kebijakan anti korupsi melalui kegiatan/regulasi/sosialisasi		Indeks EPK		35%	50%	100%	100%	Inspektorat	Inspektur
					2. Mengimplementasikan proses pengadaan dan pembayaran secara elektronik untuk meningkatkan transparansi dan mengurangi risiko korupsi.	1	Dokumen		35%	50%	100%	100%	Inspektorat	Inspektur

NO	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KEGIATAN UTAMA	TARGET TAHUN 2023	TARGET TAHUN 2024	RENCANA AKSI (UPAYA UTK MEWUJUDKAN)	OUTPUT		TARGET PENYELESAIAN					UNIT/SATUAN KERJA PELAKSANA	
						JUMLAH	SATUAN	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	KOORDINATOR	PELAKSANA
		Survei Penilaian Integritas (SPI) (KPK)	83,44	83,50	3. Melaksanakan sosialisasi secara berkala untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang kebijakan anti korupsi, dengan melibatkan semua pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal.	1	Dokumen		35%	50%	100%	100%	Inspektorat	Inspektur
					1. Mengirimkan formulir keikutsertaan dan memastikan semua data diperbaharui dan dikirim tepat waktu.		Indeks SPI		50%	100%		100%	Inspektorat	Inspektur
					2. Menyediakan data responden internal, eksternal, dan expert yang akurat dan terkini untuk mendukung pelaksanaan Survei Penilaian Integritas.	1	Dokumen		35%	50%	100%	100%	Inspektorat	Inspektur
15	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	85%	90%	1. Pendampingan Pemeriksaan BPK	85%	Persentase Tindak lanjut		80%		85%	85%	Inspektorat	Inspektur
					2. Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK	85%	Persentase Tindak lanjut		80%		85%	85%	Inspektorat	Inspektur
					3. Pendampingan Penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	1	Laporan				1	1	Inspektorat	Inspektur

Draf Perubahan Rencana Aksi RB Tematik: Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PKE)

NO	PERMASALAHAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2023	RENCANA AKSI (UPAYA UTK MEWUJUDKAN)	OUTPUT		TARGET				KETERKAITAN DGN MASYARAKAT/STAKEHOLDERS UTAMA	UNIT SATUAN PELAKSANA	
						SATUAN	INDIKATOR	TW I (Jan-Mar)	TW II (Apr-Jun)	TW III (Jul-Sep)	TW IV (Okt-Des)		KOORDINATOR	PELAKSANA
1	Pengaturan APBN/APBD/APBDes berubah setiap tahun, sehingga dapat dimungkinkan prioritas penggunaan anggaran untuk kemiskinan ekstrem tidak tercantum kembali pada klausul regulasi	Tercapainya konvergensi intervensi program yang bersumber dari APBN/APBD/APBDes	Dokumen rekomendasi perbaikan regulasi pengaturan penggunaan APBN/APBD/APBDes tahun berikutnya bagi Kementerian teknis	1 dokumen pelaporan	Mendorong regulasi penggunaan APBN/APBD/APBDes untuk isu Kemiskinan Ekstrem	Dokumen	Jumlah dokumen				1	Tidak berkaitan	Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial	Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Desa
		Terpetakannya dukungan anggaran baik untuk pelaksanaan strategi 1, 2, dan 3	Dokumen rekomendasi tagging anggaran nomenklatur APBN/APBD tahun berikutnya bagi Kementerian teknis	1 dokumen pelaporan	Disepakatinya tagging anggaran nomenklatur APBN/APBD terkait strategi PPKE	Dokumen	Jumlah dokumen				1	Tidak berkaitan	Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial	Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Bappenas, KL dalam Inpres 4/2022, KPK dan Kemen PANRB
2	Belum optimalnya penggunaan data P3KE sebagai evidence base PPKE	Tersedianya panduan penggunaan data P3KE	Dokumen panduan penggunaan data P3KE	1 Dokumen	Penyempurnaan panduan penggunaan data P3KE	Dokumen	Jumlah dokumen	1				Tidak berkaitan	Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial	Kemenko PMK dan TNP2K
		Penyediaan Sistem distribusi data P3KE	Webservice data P3KE	1 webservice	Pengembangan webservice data P3KE	Webservice	alamat webservice	1				Tidak berkaitan	Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial	Kemenko PMK dan TNP2K
		Terwujudnya pemanfaatan data P3KE bagi K/L/Pemerintah Daerah	Akses K/L dan Pemerintah daerah terhadap data P3KE	1 dokumen pelaporan	Mendistribusikan data P3KE kepada KL dan Pemerintah Daerah	Dokumen laporan	Jumlah dokumen				1	Tidak berkaitan	Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial	Kemenko PMK, Kemendagri dan TNP2K
			Kegiatan konsultasi/audiensi	1 dokumen pelaporan	Literasi data dan pendampingan penggunaan	Dokumen	Jumlah dokumen				1	Tidak berkaitan	Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial	Kemenko PMK, Kemendagri dan TNP2K
		Peningkatan pemanfaatan data P3KE bagi non-pemerintah	Akses non-pemerintah terhadap data P3KE	1 dokumen pelaporan	Mendistribusikan data P3KE kepada non-pemerintah	Dokumen laporan	Jumlah dokumen				1	Tidak berkaitan	Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial	Kemenko PMK, Satgas Konvergensi dan TNP2K
		Data P3KE telah dimiliki oleh wilayah dengan KE tinggi	Distribusi data pada wilayah dengan persentase Kemiskinan Ekstrem Tinggi	1 Dokumen Laporan	Mendistribusikan data kepada wilayah dengan KE tinggi	Dokumen	Jumlah dokumen	1				Tidak berkaitan	Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial	Kemenko PMK dan TNP2K

3	Belum optimalnya monitoring evaluasi pelaksanaan PPKE terhadap K/L/Pemerintah Daerah	Tersedianya sistem pelaporan PPKE Pemerintah Daerah	Koordinasi mendorong pelaporan oleh user	1 laporan	Mendorong Pemerintah Daerah menggunakan sistem pelaporan	Dokumen	Jumlah dokumen	1		1		Tidak berkaitan	Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial	Kemenko PMK dan TNP2K
		Penyampaian Pelaporan Pemerintah Daerah terkait PPKE	Peningkatan aspek kualitas laporan dan ketepatan waktu	1 laporan	Penyusunan juknis Pelaporan	Dokumen	Jumlah dokumen		1			Tidak berkaitan	Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial	Kemenko PMK dan TNP2K
				1 laporan	Pendampingan Pelaporan Daerah	Dokumen	Jumlah dokumen	1	1	1	1	Tidak berkaitan	Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial	Kemenko PMK, Kemendagri, Stranas KPK, Kemen PANRB, BPKP dan TNP2K
			Peningkatan jumlah Pemerintah Daerah yang melaporkan	1 laporan	Melakukan monitoring absensi Pemerintah Daerah	Dokumen laporan	Jumlah dokumen	1	1	1	1	Tidak berkaitan	Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial	Kemenko PMK, Kemendagri, Stranas KPK, Kemen PANRB, BPKP dan TNP2K
				1 laporan	Memberikan insentif melalui Kementerian Keuangan	Dokumen laporan	Jumlah dokumen				1	Tidak berkaitan	Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial	Kemenko PMK, Kemenkeu, Kemendagri, TNP2K
		Terfasilitasinya K/L terkait pelaporan PPKE	Tersedianya web monitoring K/L	webservice	Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi K/L	Webservice	Jumlah dokumen				1	Tidak berkaitan	Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial	Kemenko PMK, Kemen PANRB, dan TNP2K
		Tersedianya hasil hitung kemiskinan ekstrem Provinsi, Kabupaten/kota	Angka kemiskinan tingkat Provinsi, Kabupaten/kota	1 dokumen	Mendorong perhitungan kemiskinan ekstrem di kabupaten dan kota	Dokumen laporan	Jumlah dokumen	1				Tidak berkaitan	Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial	Kemenko PMK, Satgas Konvergensi, BPS, TNP2K
		Pemantauan Implementasi intervensi PPKE	Memperoleh evidence based intervensi PPKE	1 dokumen pelaporan	Melakukan kunjungan lapangan dan rapat koordinasi daerah	Dokumen laporan	Jumlah dokumen				1	Tidak berkaitan	Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial	Kemenko PMK, dan seluruh KL Inpres 4/2022
4	Belum optimalnya keterpaduan program PPKE	Analisis dampak tagging anggaran	memperoleh analisis dampak hasil tagging anggaran APBN, APBD/APBDes	1 dokumen	melakukan rapat koordinasi dampak tagging anggaran	Dokumen laporan	Jumlah dokumen		1			Tidak berkaitan	Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial	Kemenko PMK, TNP2K
		Terselenggaranya koordinasi multipihak	Kesepakatan rumusan kebijakan	1 dokumen	Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi implementasi program PPKE di daerah atau bersama K/L	Dokumen laporan	Jumlah dokumen				1	Tidak berkaitan	Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial	Kemenko PMK, Kemenko Ekonomi, Satgas Konvergensi

Draf Perubahan Rencana Aksi RB Tematik: Digitalisasi Adm. Pemerintahan untuk Penurunan *Stunting*

NO	PERMASALAHAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2023	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET				KETERKAITAN DGN MASYARAKAT/STAKEHOLDERS UTAMA	UNIT SATUAN PELAKSANA	
						SATUAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV		KOORDINATOR	PELAKSANA
1	Belum optimalnya pengelolaan (tata kelola) percepatan penurunan stunting di tingkat pusat hingga daerah (provinsi prioritas), berupa: 1. Komitmen 2. Regulasi 3. Perencanaan 4. Anggaran 5. SDM 6. Koordinasi 7. Data 8. Monitoring dan Evaluasi	Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi, pengendalian, (KSP) dan pengawalan untuk optimalisasi tata kelola percepatan penurunan stunting di tingkat pusat hingga daerah (provinsi prioritas), berupa: 1. Komitmen 2. Regulasi 3. Perencanaan 4. Anggaran 5. SDM 6. Koordinasi 7. Data 8. Monitoring dan Evaluasi	Dokumen Rekomendasi Kebijakan	1 Dokumen rekomendasi kebijakan	Melakukan KSP dan pengawalan untuk optimalisasi tata kelola dalam percepatan penurunan stunting di tingkat pusat	Dokumen	Jumlah Dokumen Rekomendasi Kebijakan		1		1	Tidak terkait	Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan, Kemenko PMK	Asisten Deputi Ketahanan Gizi dan Promosi Kesehatan Kemenko PMK, dan K/L Terkait
					Melakukan konsolidasi dan penguatan tingkat pusat dan daerah (provinsi prioritas) untuk optimalisasi tata kelola dalam percepatan penurunan stunting	Dokumen	Jumlah Dokumen Rekomendasi Kebijakan		1		1	Tidak terkait	Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan, Kemenko PMK	Asisten Deputi Ketahanan Gizi dan Promosi Kesehatan Kemenko PMK, dan K/L Terkait
2	Cakupan Intervensi spesifik dan intervensi sensitif yang belum tercapai sesuai target di Perpres no 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting	Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi, pengendalian, (KSP) dan pengawalan pencapaian target indikator intervensi spesifik dan	Dokumen Rekomendasi Kebijakan	1 Dokumen rekomendasi kebijakan	Melakukan KSP dan pengawalan untuk pencapaian target indikator intervensi spesifik dan intervensi sensitif dalam Perpres no 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting di tingkat pusat	Dokumen	Jumlah Dokumen Rekomendasi Kebijakan		1		1	Tidak terkait	Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan, Kemenko PMK	Asisten Deputi Ketahanan Gizi dan Promosi Kesehatan Kemenko PMK, dan K/L Terkait

Paraf Eselon II

NO	PERMASALAHAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2023	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET				KETERKAITAN DGN MASYARAKAT/ STAKEHOLDERS UTAMA	UNIT SATUAN PELAKSANA	
						SATUAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV		KOORDINATOR	PELAKSANA
		Intervensi sensitif dalam Perpres no 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting di tingkat pusat hingga daerah (provinsi prioritas)			Melakukan konsolidasi dan penguatan tingkat pusat dan daerah (provinsi prioritas) untuk pencapaian target indikator intervensi spesifik dan intervensi sensitif dalam Perpres no 72 tahun 2021 percepatan penurunan stunting	Dokumen	Jumlah Dokumen Rekomendasi Kebijakan		1		1	Tidak terkait	Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan, Kemenko PMK	Asisten Deputi Ketahanan Gizi dan Promosi Kesehatan Kemenko PMK, dan K/L Terkait